

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses utama yang dapat membawa perekonomian menuju tahap yang lebih maju (Boediono, 2016: 37). Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor permasalahan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial (Bambang, 2007: 5). Permasalahan sosial yang muncul akibat rendahnya suatu pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan (Maryati, 2006: 22).

Kemiskinan di anggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang di akibatkan adanya dampak negative dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (Harahap, 2006: 22). Secara umum kemiskinan di artikan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Berdasarkan undang-undang no 24 tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara (Jonaidi, 2012: 141). Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin Indonesia masih fluktuatif, terbukti dari data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Dan Penduduk Miskin Di
Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persentase)	Kemiskinan (persentase)
2013	5,56	11,42
2014	5,02	11,105
2015	4,79	11,175
2016	5.02	10,78
2017	5.07	10,64

Sumber : www.bps.go.id, 2018

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,56% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,37% pada bulan maret 2013 dan 11,47% pada September 2013. Pada tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,54% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,25% pada maret 2014 dan 10,96 pada September 2014. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 4,79% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,22% pada maret 2015 dan 11,13% pada September 2015. Dua tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,02 pada tahun 2016 dan 5,07% pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun.

Berdasarkan persoalan di atas pembangunan suatu negara akan lebih baik jika di tunjang dengan banyaknya usaha yang di miliki oleh wirausahawan (Wahyuningsih, 2009: 1). Sektor industry merupakan salah satu sektor usaha yang berperan penting dalam pembangunan nasional baik di Negara, provinsi maupun daerah. Sektor industry di suatu wilayah

menjadi suatu potensi yang dapat di gunakan sebagai sarana peningkatan perekonomian daerah. (Dyah,fafurida 2011)

Salah satu sektor industry yang berperan dan menjadi pemegang penting dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM lebih di kaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberantas kemiskinan. UMKM di Indonesia di gambarkan sebagai kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern (Anggreini,adhe 2016)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat (www.bi.go.id , 2018). Sejauh ini UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh oleh adanya krisis pada tahun 1997-1998 dan tetap berdiri kokoh (Putra,2016: 44).

Hal tersebut dapat di lihat melalui data perkembangan UMKM di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pelaku Usaha Menurut Skala Usaha Tahun 2013-2017

Tahun	Unit usaha (A+B)	a. UMKM	b. Usaha Besar (UB)
2013	56.539.560	56.534.592	4.968
2014	57.900.787	57.895.721	5.066
2015	59.267.759	59.262.772	4.984
2016	61.656.547	61.651.177	5.370
2017	62.928.077	62.922.617	5.460
Jumlah	7.716.680	7.716.172	508
perkembangan			
2012-2017			

Sumber: www.depkop.go.id,2018

Berdasarkan data di atas perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah perkembangan UMKM dari tahun 2012-2017 menurut skala usaha sebesar 7.716.172 unit usaha yang berdiri. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia yang bersifat padat karya menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah di pahami mampu menjadi wadah masyarakat untuk bekerja (Dwi, 2011:6). Akan tetapi, perkembangan UMKM ini masih menghadapi kendala terutama dalam mengakses biaya dari sektor perbankan. Oleh sebab itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut salah satunya dengan program inklusi keuangan (Setiowati, 2017:112).

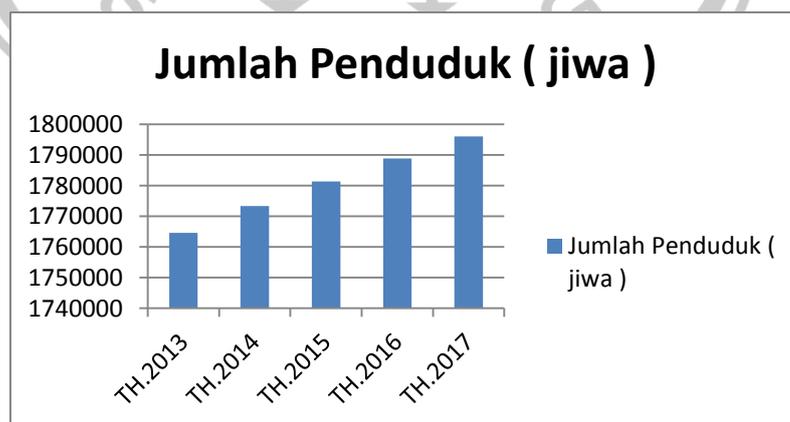
Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat di akses seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Inklusi keuangan di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010, dimana Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategi For Financial Inclusion (NSFI)* yang merupakan program dari inklusi keuangan sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini 32% atau 76 juta penduduk belum tersentuh jasa keuangan, selain itu juga 60-70% UMKM belum memiliki akses terhadap perbankan. Jika dilihat dari perkembangan UMKM yang tertera pada tabel 1.2 di atas, UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran yang ada di daerah-daerah tertentu, baik itu pengangguran yang ada di kota maupun di desa (Nengsih, 2015:225).

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran. Di bawah ini adalah data penduduk Kabupaten Brebes:

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017



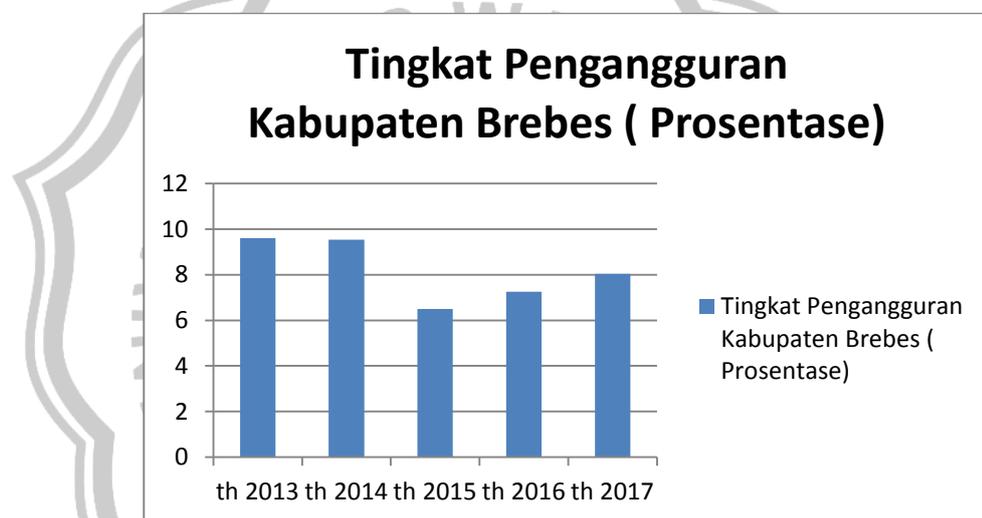
Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2018 (diolah)

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun meningkat, oleh sebab itu perlunya lapangan

pekerjaan untuk meminimalisir adanya pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi dan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah (syahril, 2014: 80).

Brebes adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, hal tersebut dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes
Pada Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaen Brebes, 2018 (diolah)

Berdasarkan data di BPS kabupaten brebes, dapat kita lihat jumlah pengangguran yang ada di kabupaten brebes berdasarkan grafik masih fluktuatif, terlihat pada grafik 1.2 pada tahun 2013 sampai 2015 pengangguran di kabupaten brebes mengalami penurunan setiap tahunnya, hal tersebut dapat di katakan bahwa perekonomian di kabupaten brebes masih berada diposisi aman. Akan teapi posisi tersebut hanya sementara karena pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai 2017 pengangguran di kabupaten brebes mengalami peningkatan yang mengakibatkan

melemahnya suatu perekonomian. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk membuka lapangan kerja sendiri yaitu dengan mendirikan usaha kecil milik sendiri.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di daerah brebes. Perkembangan UMKM di berbagai daerah saat ini masih terhambat sejumlah persoalan yakni salah satunya adalah persoalan modal (Irmawati, 2013:153).

Tetapi jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah maka akan mendorong terjadinya peningkatan perputaran modal. Hal tersebut dapat menjadi langkah untuk mendorong bertumbuhnya suatu perekonomian yang ada di daerah. Namun pada kenyataannya Indonesia saat ini masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan serta masih minimnya pemahaan masyarakat mengenai inklusi keuangan yang ada di lembaga keuangan (Rahmadani, 2017:113).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka munculah kegiatan sektor keuangan mikro yang kegiatannya berasal dari individu yang ada di masyarakat dimana individu tersebut memberikan permodalan kepada pelaku UKM. Individu ini sering di sebut rentenir, masyarakat kecil ataupun pengusaha kecil lebih mengandalkan jasa keuangan yang di tawarkan oleh rentenir dengan alasan permodalan yang di berikan oleh rentenir lebih fleksibel dan cepat meskipun harus membayar bunga tinggi (Setiowati, 2017:113).

Menurut Dale.W Adam, Rentenir adalah individu yang memberika n pinjaman jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga

yang relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya. Jika nasabah tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah di tentukan maka akan di perpanjang sehingga bunganya semakin besar dan memberatkan kepada nasabah peminjam (Setiowati, 2017:113).

Rentenir tetap menjadi alternatif di saat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang di butuhkan sangatlah rumit (Nugroho, 2001:86). Terlebih lagi di desa Negla Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang terletak 38 km dari pusat pemerintahan kabupaten Brebes yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses modal di lembaga keuangan syariah.

Minimnya lembaga keuangan syariah di desa Negla membuat masyarakat kesulitan memperoleh modal usaha dengan cepat. Oleh sebab itu, rentenir semakin merajalela dengan kemudahan yang di berikan kepada masyarakat yang pemahamannya masih minim terhadap lembaga keuangan syariah. Dari situlah masyarakat yang membutuhkan modal secara cepat memilih jalan untuk menerima modal dari rentenir. Persyaratan yang mudah membuat masyarakat mempergunakan dana tersebut tidak hanya sebagai modal usaha, akan tetapi mayoritas masyarakat kalangan menengah kebawah mempergunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya jumlah rentenir yang ada di desa Negla kecamatan Losari Kabupaten Brebes memudahkan

masyarakat untuk menerima modal dengan cepat tanpa harus menyediakan persyaratan yang terlalu rumit.

Rentenir di katakan sebagai penopang keuangan masyarakat, akan tetapi keberadaannya itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Setiowati, 2017:113). Kebutuhan hidup yang tinggi dan mendesak menjadikan sebagian masyarakat tetap terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun harus menanggung bunga yang besar dan bahkan lebih besar dari hutang pokoknya ketika melebihi perjanjian yang telah di tentukan (Budianto, 2017:1). Sistem ekonomi islam melarang adanya aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, jual beli barang haram dan riba, dalam islam memperoleh harta dan menafkakhannya melalui jalan yang halal sangat di tentukan, hal ini demi kebaikan manusia itu sendiri (Shihab, 2005:194).

Fenomena rentenir yang sekarang banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan dalih menolong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, secara tidak langsung belum memberikan solusi dalam permasalahan ekonomi rakyat kecil, karena praktek rentenir tersebut mengandung unsure riba. seperti yang kita ketahui riba di larang bagi umat muslim. Larangan riba tersebut tecantum dalam Al-Qur'an surat Al-Imron 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan bahwa pengambilan keuntungan yang berlipat ganda adalah termasuk riba dan perbuatan riba diharamkan oleh Allah SWT. Agama Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem perekonomian dalam Islam, saat ini lebih dikenal dengan Ekonomi Syariah (Husnul, 2016:133).

Berdasarkan persoalan di atas maka dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang mempunyai kompetensi, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai konsisten pada penguatan lembaga keuangan sektor mikro, yang merupakan salah satu strategi menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif (Rahmadani, 2017:113).

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada (Setiowati, 2017:114).

Keuangan inklusif dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara bank dan lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya dan dapat menjadi landasan

berpijak bagi keuangan inklusif terutama dalam hal pengadaan modal. Bagi masyarakat yang berada di desa, lembaga keuangan mikro sangat di perlukan untuk membantu dalam hal permodalan. Oleh sebab itu, lembaga keuangan mikro yang sudah banyak menyentuh kelompok miskin serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga perlu di maksimalkan keberadaannya (khatimah, 2016:132).

Inklusi keuangan ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang pro rakyat. Untuk mewujudkan Inklusi keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah adalah BMT Amanah

BMT Amanah merupakan lembaga keuangan mikro yang berupaya membantu dalam kesulitan masyarakat dalam hal kebutuhan keuangan. BMT Amanah juga menjadi lembaga yang dapat mengurangi adanya rentenir. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana

non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Menurut Soemitra dalam Aslikhah, (2011: 20) menyatakan bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT juga berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota maupun masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dari tujuan dan peran BMT di atas, maka dapat menjadi jalan untuk mengurangi menjamurnya rentenir di masyarakat. Demikian halnya dengan BMT Amanah dalam mengurangi praktik rentenir di desa negla kecamatan losari kabupaten brebes.

Dalam praktek kerjanya BMT ini memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya terjamin serta mempermudah kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana strategi yang di jalankan BMT Amanah dalam meningkatkan inklusi keuangan?
2. Bagaimana implementasi inklusi keuangan bagi masyarakat desa negla kecamatan losari kabupateen brebes?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum : Untuk mengetahui upaya BMT Amanah dalam melaksanakan program inklusi keuangan bagi masyarakat desa negla kecamatan losari kabupaten brebes.

Tujuan Khusus : Untuk meminimalisir praktik rentenir di lingkungan masyarakat dengan adanya program inklusi keuangan di BMT Amanah. Sehingga masyarakat terhindar dari praktik riba.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan agar peneliti dapat memperoleh tambahan ilmu serta mendapat informasi mengenai program inklusi keuangan sebagai salah satu solusi untuk meinimalisir adanya praktik ribawi di lingkungan masyarakat.

2. Bagi Pihak Praktisi

Hasil dari peelitian ini di harapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pada BMT Amanah. Dengan pelayanan yang baik dalam penyalurran dana bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang berminat dan mendukung untuk menggunakan jasa yang telah di sediakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam mendalami laporan penelitian. Adapun sistematika laporan penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengujian keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisa data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.